BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum

3.1.1 Kabupaten Semarang

Berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah, pada masa pemerintahan Bupati Iswarto (1969-1979), Ibu kota Kabupaten Semarang secara *defacto* dipindahkan ke Ungaran. Pada tahun 2005 kecamatan Ungaran dimekarkan menjadi dua yaitu Ungaran Barat dan Ungaran Timur. Pembagian Administratif Kabupaten Semarang terdiri atas 19 kecamatan, yaitu Ungaran Barat, Ungaran Timur, Bergas, Pringapus, Bawen, Bringin, Tuntang, Pabelan, bancak, Suruh, Susukan, Kaliwungu, Tengaran, Getasan, banyubiru,Sumowono, Ambarawa, jambu, Bandungan. Pengusaha di Kabupaten Semarang tergolong menjadi pengusaha kecil, pengusaha menengah dan pengusaha besar (Wikipedia.org).

3.1.2 Badan Keuangan Daerah (BKUD)

Badan Keuangan Daerah (BKUD) merupakan badan yang melaksanakan kegiatan Pemerintahan daerah Kabupaten Semarang. Lokasi BKUD terletak di jalan ahmad yani nomor 55 ungaran Kabupaten Semarang.

1. Visi BKUD

"Terselenggaranya pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efisien dan efektif berdaya guna dan berhasil guna, transparan dan akuntabel dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejaheraan masyarakat".

2. Misi BKUD

a. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan sistem kerja yang produktif dan kondusif untuk kelancaran pelaksanaan tupoksi guna mewujudkan aparatur yang profesional.
b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
c. Pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah
d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara professional sesuai potensi riil dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

3.1.3 Struktur Organisasi BKUD

Susunan organisasi BKUD sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja, dan perincian tugas perangkat daerah kabupaten semarang, sebagai berikut :

Gambar 3.1

Bagan Organisasi Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah

Kabupaten Semarang

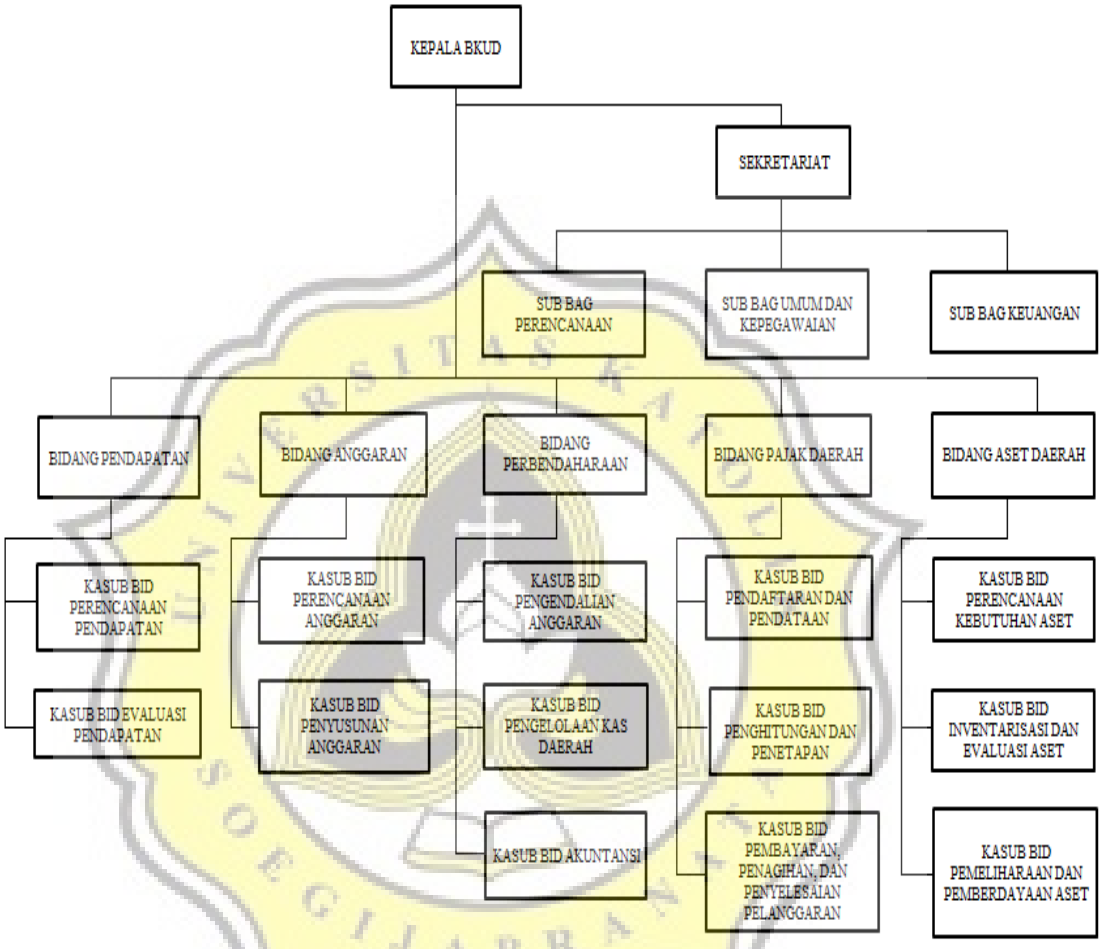

Sumber : BKUD Kabupaten Semarang

3.1.4 Tugas dan Fungsi Pimpinan Badan Keuangan Daerah (BKUD)

Tugas dan fungsi pimpinan di Badan keuangan Daerah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

A. Kepala

Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang keuangan daerah dan berfungsi untuk perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembinaan dan pelaksanaan, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretariat

Melaksanakan tugas bidang penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum, dan administrasi kepegawaian.

C. Bidang Pendapatan

Melaksanakan tugas bidang pendapatan, dan berfungsi untuk perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan.

D. Bidang Anggaran

Melaksanakan tugas bidang anggaran, berfungsi untuk perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang anggaran.

E. Bidang Perbendaharaan

Melaksanakan tugas bidang perbendaharaan, berfungsi untuk perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan

kegiatan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan.

F. Bidang Pajak Daerah

Melaksanakan bidang pajak daerah, berfungsi untuk perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan, dan perencanaan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pajak daerah.

G. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Melaksanakan tugas bidang pengelolaan aset daerah dan berfungsi untuk penyusunan dan perumusan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan kebutuhan aset daerah, bidang inventarisasi dan evaluasi aset daerah, bidang pemeliharaan dan pemberdayaan aset daerah.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada bidang pendapatan, dan bidang pajak daerah untuk mengetahui permasalahan dilapangan dan upaya untuk mengatasinya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah diolah dan disajikan oleh pengumpul data primer atau pihak lain untuk digunakan Penulis dalam melakukan proses pembahasan masalah. Data sekunder yang digunakan antara lain data daftar wajib pajak, laporan buku besar wajib pajak, target dan realisasi Pajak Parkir pada tahun 2016 di Kabupaten Semarang yang sudah diolah oleh Badan Keuangan Daerah (BKUD).

3.2.2 Metode pengumpulan data

Ada dua cara yang dilakukan dalam metode pengumpulan data, yaitu :

a. Metode Wawancara

Metode ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi secara langsung dari pihak petugas / pegawai yang bertugas atau mempunyai tanggungjawab untuk menangani masalah pajak parkir. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 17 juli—22 agustus tahun 2017 saat kegiatan Praktik Kerja Lapangan berlangsung, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap petugas yaitu :

1. Kendala yang dialami oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dalam mengelola Pajak Parkir pada tahun 2016.
2. Upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi kendala pengelolaan Pajak Pakir di Kabupaten Semarang tahun 2016.

b. Metode Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara membaca peraturan daerah, peraturan perpajakan dan literatur lain yang berkaitan dengan Pajak Parkir.

3.2.3 Metode analisis data

Penelitian ini menggunakan dua metode yakni pertama, metode analisis data kuantitatif berupa bilangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah Wajib Pajak, angka target dan realisasi Pajak Parkir untuk mengetahui persentase ketercapaian Pajak Parkir tahun 2016 di Kabupaten Semarang. kedua, Data kualitatif merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang yang terkait dengan Pajak Parkir.